

# Pengukuran Kinerja Keuangan Sektor Publik Menggunakan Metode *Value For Money* Pada Pemprov DKI Jakarta

Andrian Natanail Silaban<sup>1\*</sup>, Tika Triana Lismono<sup>2</sup>, Erika Silaen<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Bina Sarana Informatika  
Jl. Kramat Raya No. 98, Jakarta Pusat, Indonesia

\*email korespondensi: [silabanandrian@gmail.com](mailto:silabanandrian@gmail.com)

## Abstrak

Pengukuran kinerja di sektor publik ialah upaya yang dilakukan untuk memungkinkan para pengelola sektor publik mengevaluasi keberhasilan strategi melalui indikator finansial dan non-finansial, dengan menerapkan aturan praktik keuangan yang tepat dan akurat. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai kondisi finansial, yang sangat krusial untuk membuat keputusan yang tepat. Studi ini menilai kinerja keuangan Pemprov DKI Jakarta selama tiga tahun anggaran (2020-2023) dengan menerapkan metode *Value For Money*, yang memperhitungkan aspek ekonomi, efisien, dan efektivitas. Pendekatan yang diimplementasikan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan menjawab permasalahan penelitian melalui kajian yang sekomprensif mungkin. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran (2020-2023), cukup ekonomis dalam hal ekonomi, kurang efisien dalam hal efisiensi, namun efektif dalam hal efektivitas. Hasil analisa ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkinerja baik dalam mengatur keuangannya.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan, *Value for Money*; Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas

## Abstracts

*Performance measurement in the public sector is an effort made so that public sector managers can evaluate the success of strategies through financial and non-financial indicators, by applying appropriate and accurate financial practice rules. The aim of this analysis is to gain a deeper understanding of financial conditions, which is essential for making informed decisions. This research assesses the financial performance of the DKI Jakarta Provincial Government for three fiscal years (2020-2023) by applying the Value For Money method which considers economic, efficiency and effectiveness aspects. The approach applied in this research is descriptive qualitative to describe, explain and answer research problems through a study that is as comprehensive as possible. Research findings show that the financial performance of the DKI Jakarta Provincial Government for the fiscal year (2020-2023) is quite economical from an economic perspective, less efficient in terms of efficiency, but effective in terms of effectiveness. The results of this analysis show that the DKI Jakarta Provincial Government has good performance in managing its finances..*

Keywords : *Financial Performance, Value for Money; Economy, Efficiency, Effectiveness*

## 1. Pendahuluan

Peran anggaran sangat esensial bagi sektor publik. Anggaran mencakup rencana dan arahan untuk kegiatan yang menghasilkan pendapatan, ekspektasi dan perkiraan biaya yang harus dikeluarkan dan dilakukan demi menyempurnakan suatu program dalam kurun waktu tertentu, serta memberikan transparansi informasi kepada publik. Mengacu pada (Mardiasmo, 2021) menyatakan bahwa “Anggaran Sektor Publik adalah laporan yang memperlihatkan situasi anggaran suatu organisasi dan berisi penjelasan tentang penerimaan, pengeluaran, dan kegiatan dalam satuan moneter”. Sedangkan anggaran dijelaskan sebagai penafsiran mengenai perkiraan kinerja diharapkan untuk diperoleh selama kurun waktu tertentu yang diwakili dalam parameter keuangan (Manurung & Mauliddina, 2021). Menurut (Sartisi, 2022) Anggaran sektor publik memiliki empat tujuan utama yaitu menunjang pemerintahan dalam mewujudkan sasaran fiskal dan mengharmonisasikan antar departemen dalam lingkup pemerintahan, mendukung terciptanya efisiensi dan pemerataan dalam membuat barang dan jasa publik melalui mekanisme penentuan prioritas, memungkinkan pemerintah dalam menetapkan prioritas pengeluaran, dan mengoptimalkan transparansi serta tanggung jawab pemerintahan kepada DPR, DPRD dan masyarakat luas.

Pratama dkk menjelaskan dalam (Panggabean, 2019) laporan keuangan pemerintahan daerah menunjukkan bagaimana daerah mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan dana untuk belanja atau pembiayaan, serta pendapatan dari PAD, transfer, hibah, dan dana penyeimbang dari pemerintah pusat. Laporan keuangan harus memenuhi kebutuhan pengguna informasi keuangan dengan memberikan penjelasan yang kuantitatif,



komprehensif, serta dapat diandalkan. Selain itu, laporan keuangan harus menggambarkan situasi dengan akurat dan tidak biasa agar orang yang menggunakannya tidak disesatkan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat dilihat dan diaudit lebih lanjut, format dalam laporan keuangan bervariasi (Tegor et al., 2021). Pengelolaan keuangan mencakup kepatuhan terhadap prinsip keakuratan waktu dan menyampaikan laporan keuangan yang andal yang dibuat di SAP. Ada beberapa jenis LKPD yang dianalisa, terdiri dari berbagai komponen, yaitu: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan.

Sujarweni menjelaskan dalam (Sahrani & Kusumastuti, 2024) Sektor publik mencakup semua aspek yang terkait dengan kepentingan umum serta pengadaan barang dan jasa untuk masyarakat, yang didanai dengan pajak dan sumber pendapatan pemerintah lainnya yang diatur oleh undang-undang. Sektor publik juga berusaha mencapai kebaikan bersama melalui pembangunan, kelangsungan hidup, dan adaptasi lingkungan. Pemerintah berhasil jika keuangan mereka stabil, oleh karena itu pemerintah harus mengevaluasi kinerjanya secara berkala atau menggunakan alatnya untuk melakukannya melalui analisa laporan keuangan pemerintah.

Analisa laporan keuangan adalah memecah penguraian item-item dalam laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih detail dan mengevaluasi keterkaitan antara data kuantitatif maupun non kuantitatif yang penting. Tujuan analisis ini adalah untuk memperoleh lebih banyak tentang situasi finansial, yang sangat krusial dalam pengambilan keputusan yang akurat (Susanti et al., 2022). Tujuan lain dalam analisis laporan keuangan yaitu mengidentifikasi keinginan atau hasil yang diharapkan dari analisa yang dijalankan. Memiliki tujuan memungkinkan analisa untuk diorganisir, dibatasi, dan mencapai hasil yang diinginkan (Rochman & Pawenary, 2020). Adapun beberapa keuntungan dari analisis laporan keuangan menurut (Pardiastuti & Herawati, 2020), yaitu: untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan supaya dapat menilai kinerjanya, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan manajemennya, dan sebagai bahan perbandingan mengenai pencapaian yang telah dicapai dalam jangka waktu tertentu. Hasil dari analisis laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Pengukuran kinerja sektor publik ialah upaya untuk memungkinkan manajer sektor publik mengevaluasi keberhasilan strategi melalui penggunaan metrik keuangan dan non-finansial (Sutama et al., 2022). Kinerja keuangan ialah hasil atau ukuran dari analisa yang menentukan seberapa baik telah melakukan aktivitasnya dengan menerapkan praktik keuangan yang tepat dan akurat. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan hasil program yang diperoleh dalam menggunakan anggaran daerah dengan jumlah dan kualitas yang terukur, sementara kapasitas lokal dapat dinilai dengan mengevaluasi layanan yang diberikan kepada masyarakat (Polii et al., 2020). Di sisi lain, evaluasi kinerja keuangan merupakan cara untuk menentukan nilai sesuatu. Alat ukur yang relevan biasanya untuk mengukur nilai objek atas suatu unit angka yang paten (Drastiana & Himmati, 2021). Menurut (Mahsun, 2019) ada beberapa jenis penilaian kinerja keuangan, yang terdiri dari analisa anggaran, analisa rasio keuangan, metode *Balanced Scorecard*, dan *value for money* (VFM).

*Value For Money* (VFM) dianggap sangat krusial bagi organisasi sektor publik dan sering dianggap sebagai esensi dari penilaian kinerja sektor publik. *Value For Money* (VFM) berfungsi sebagai titik fokus evaluasi implementasi di organisasi pemerintah dan sektor publik. Informasi sumber, *output*, dan *outcome* harus dipertimbangkan secara sistematis sebelum survei dilakukan untuk memberikan gambaran yang akurat tentang praktik pemerintahan yang sebenarnya, karena kinerja pemerintahan harus melibatkan input, output, dan proses, pengukuran kinerja pemerintahan didasarkan pada nilai uang (Wulandari et al., 2024). Menurut Mardiasmo dalam jurnal (Tameon et al., 2023) Keuntungan yang diharapkan dari penerapan *value for money* di organisasi sektor publik ialah ekonomi (penghematan) dalam pembelian dan penempatan sumber daya, efisiensi (kegunaan) dalam penggunaan sumber daya, dan efektivitas (keberhasilan) dalam mencapai tujuan dari target yang ditetapkan.

## 2. Metode

Metode studi ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan dan menganalisa kinerja keuangan di sektor publik dengan menggunakan metode *value for money*, mencakup aspek kinerja ekonomi, efisiensi, dan efektifitas. Mengacu pada Sugiyono dalam (Qosasi & Riharjo, 2022) penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi makna, mengidentifikasi variasi, dan memahami konsep-konsep persepsi yang timbul dari fenomena yang diamati dalam penelitian. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan, mengungkapkan, menjelaskan, dan menjawab permasalahan yang diteliti secara detail dengan mengkaji secara mendalam individu, kelompok atau peristiwa.

Dalam studi ini, peneliti menggunakan data sekunder sebagai metode pengumpulan data karena penelitian dilakukan secara tidak langsung, melainkan melalui pengunduhan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dari situs PPID DKI Jakarta. Dengan menggunakan metode ini, memudahkan peneliti dalam melakukan penelitiannya tanpa interaksi langsung dan akses terhadap data yang dibutuhkan. Analisis yang diteliti pada studi ini berfokus pada laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) DKI Jakarta untuk periode 2020-2022.

2.1. Metode Analisis Data

Perhitungan dan analisa data diukur dengan mengaplikasikan metode *value for money* untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan

- a. Ekonomi, mengacu pada perbandingan antara realisasi dan target belanja yang diukur dalam nilai uang. Pendapatan hasil dari input dalam jumlah dan kualitas tertentu. Perhitungan berikut dapat digunakan untuk mengukur ekonomi secara matematis:

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Input}}{\text{Input Value}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Input : Realisasi Anggaran Belanja  
Input Value : Target Anggaran Belanja

- b. Efisiensi, ialah perbandingan antara pengeluaran anggaran dan penerimanaa anggaran terkait dengan standar kinerja atau tujuan yang sudah ditetapkan. Ini juga merupakan penting untuk mencapai kinerja maksimum dengan input minimum. Perhitungan berikut dapat digunakan secara matematis untuk mengukur efisiensi:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Output : Realisasi Anggaran Belanja  
Input : Realisasi Anggaran Pendapatan

- c. Efektivitas, merupakan sebagai tingkat pencapaian suatu program terhadap tujuan yang telah ditentukan. Sederhananya, efektivitas dapat diukur melalui perbandingan antara realisasi penerimaan anggaran dan target penerimanaan anggaran. Untuk mengukur efektivitas secara matematis, dapat menggunakan perhitungan berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Outcome : Realisasi Anggaran Pendapatan  
Output : Target Anggaran Pendapatan

**3. Hasil dan Pembahasan**

Dalam menilai kinerja keuangan Pemerintah Provinsi, sangat penting untuk menggunakan standar yang relevan sebagai standar pembanding. Tanpa adanya standar yang dapat digunakan untuk menginterpretasikan ukuran yang dilakukan terhadap pemerintahan, analisis tidak akan mampu menarik kesimpulan yang akurat tentang kesehatan fiskal pemerintahan tersebut.

**Tabel 1 Kriteria Kinerja Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas**

Pengukuran	Persentase	Kriteria
Ekonomi	> 100%	Sangat Ekonomi
	90% - 100%	Ekonomi
	80% - 90%	Cukup Ekonomi
	60% - 80%	Kurang Ekonomi
	< 60%	Tidak Ekonomi
Efisiensi	> 100%	Tidak Efisiensi
	90% - 100%	Kurang Efisiensi
	80% - 90%	Cukup Efisiensi
	60% - 80%	Efisiensi
	< 60%	Sangat Efisiensi
Efektivitas	> 100%	Sangat Efektif
	90% - 100%	Efektif
	80% - 90%	Cukup Efektif
	60% - 80%	Kurang Efektif
	< 60%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi dalam (Sampow & Pangkey, 2022)

Mengacu pada informasi yang telah dipaparkan sebelumnya, perhitungan dapat dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan evaluasi kinerja keuangan Provinsi DKI Jakarta. Pengukuran ini mencakup aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dengan melakukan serangkaian kalkulasi sebagai berikut:

### 3.1. Ekonomi

Tingkat ekonomi diukur dengan membandingkan realisasi anggaran belanja dengan targetnya. Hasil perhitungan ini disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2 Analisis Ekonomi Anggaran Pemprov DKI Jakarta**

Tahun	Target Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran Belanja	Persentase	Kriteria
2020	Rp58.579.713.267.668	Rp51.716.860.929.662	88,28%	Cukup Ekonomis
2021	Rp69.605.015.911.264	Rp61.231.460.250.253	87,97%	Cukup Ekonomis
2022	Rp76.487.403.736.118	Rp64.380.358.560.086	84,17%	Cukup Ekonomis
<b>Rata - rata</b>			<b>86,81%</b>	<b>Cukup Ekonomis</b>

Sumber: Data Diolah, 2024

Mengacu **Tabel 4**, memperlihatkan adanya penurunan dalam tingkat ekonomi kinerja keuangan Pemprov DKI Jakarta dari tahun 2020 hingga 2022. Tingkat ekonomi mencapai 88% pada tahun 2020 dan dianggap cukup ekonomis. Kemudian pada tahun 2021, pemerintah meningkatkan target belanja secara signifikan sehingga tingkat ekonomi tetap berada di 88% dan masih dianggap cukup ekonomis. Pada tahun 2022, tingkat ekonomi turun menjadi 84% dan masih dianggap cukup ekonomis, meskipun ada penurunan di tahun 2022 perkembangan tingkat ekonomi pemerintah tetap stabil.

Penilaian kinerja keuangan mengacu pada metode *value for money* dengan menganalisa tingkat ekonomi memperlihatkan bahwa pengeluaran Pemprov DKI Jakarta pada periode 2020-2022 mencapai rata-rata sebesar 87% ini dianggap cukup ekonomis karena hasil perhitungan analisa berada di kisaran interval 80% - 90%. Hal ini disebabkan karena pengeluaran yang terealisasi lebih rendah daripada anggaran yang ditetapkan, kondisi ini menunjukkan kemampuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meminimalkan pemborosan sumber daya.

### 3.2. Efisiensi

Mengukur dan mengetahui tingkat efisiensi dilakukan dengan membandingkan realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran pendapatan. Hasil perhitungan tingkat efisiensi disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3 Analisis Efisiensi Anggaran Pemprov DKI Jakarta**

Tahun	Realisasi Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran Pendapatan	Persentase	Kriteria
2020	Rp51.716.860.929.662	Rp55.887.004.237.727	93%	Kurang Efisien
2021	Rp61.231.460.250.253	Rp65.567.009.199.000	93%	Kurang Efisien
2022	Rp64.380.358.560.086	Rp67.290.479.172.308	96%	Kurang Efisien
<b>Rata - rata</b>			<b>94%</b>	<b>Kurang Efisien</b>

Sumber: Data Diolah, 2024

Mengacu pada **Tabel 5**, kinerja keuangan Pemprov DKI Jakarta mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2020 hingga 2022 dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, tingkat efisiensi mencapai 93% dan dianggap kurang efisien. Pada tahun 2021, tingkat efisien tetap 93% dan dianggap kurang efisien. Dan pada tahun 2022, tingkat efisien naik menjadi 96% dan masih dianggap kurang efisien. Sehingga perkembangan tingkat efisien Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2020 hingga 2022 menunjukkan kriteria yang sama setiap tahunnya yaitu berada pada kategori kurang efisien.

Penilaian kinerja keuangan mengacu pada metode *value for money* dengan menganalisa tingkat efisien memperlihatkan bahwa tingkat efisien pengeluaran Pemprov DKI Jakarta pada periode 2020-2022 mencapai rata-rata sebesar 94% ini dinilai kurang efisien karena hasil perhitungan analisa berada di kisaran interval 90%-100%. Hal ini disebabkan meskipun realisasi pendapatan mencukupi untuk membiayai realisasi belanja, namun belum mencapai tingkat efisien yang optimal dalam kinerja pemerintahan. Ini mengindikasikan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak dapat menggunakan sumber daya minimum yang diperlukan untuk memperoleh tujuannya secara maksimal.

### 3.3. Efektivitas

Mengukur dan menentukan tingkat efektivitas dilakukan dengan cara membandingkan realisasi anggaran penerimaan dengan target anggaran penerimaan. Hasil perhitungan tingkat efektivitas disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4 Analisis Efektivitas Anggaran Pemprov DKI Jakarta**

Tahun	Target Anggaran Pendapatan	Realisasi Anggaran Pendapatan	Persentase	Kriteria
2020	Rp57.234.618.765.469	Rp55.887.004.237.727	98%	Efektif
2021	Rp65.209.105.040.795	Rp65.567.009.199.000	101%	Sangat Efektif
2022	Rp77.796.647.728.301	Rp67.290.479.172.308	86%	Cukup Efektif
<b>Rata - rata</b>			<b>95%</b>	<b>Efektif</b>

Sumber: Data Diolah, 2024

Mengacu pada **Tabel 6**, tingkat efektivitas kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berubah setiap tahunnya. Pada tahun 2020, tingkat efektivitas mencapai 98% dan dianggap efektif. Pada tahun 2021, tingkat efektivitas meningkat menjadi 101% dan dianggap sangat efektif. Namun, di tahun 2022 tingkat efektivitas kembali turun menjadi 86% dan dianggap cukup efektif.

Penilaian kinerja keuangan mengacu pada metode *value for money* dengan mengevaluasi tingkat efektivitas memperlihatkan bahwa pengeluaran Pemprov DKI Jakarta pada periode 2020-2022 mencapai rata-rata sebesar 95%, Tingkat efektivitas ini dianggap efektif karena peningkatan realisasi pendapatan dibandingkan dengan pendapatan yang telah diabaikan. Hasil analisa tersebut berada di interval 90%-100%.

## 4. Kesimpulan dan Saran

### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil analisa dengan mengevaluasi kinerja keuangan sektor publik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan penerapan metode *value for money* tahun 2020-2022, kesimpulan yang dapat diambil ialah:

- a. Aspek ekonomi, menyatakan bahwa tingkat ekonomis pengeluaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama periode tahun 2020 hingga tahun 2022 mencapai rata-rata sebesar 87% dan dinilai cukup ekonomis karena hasil perhitungan analisa berada di kisaran interval 80%-90%.
- b. Aspek efisiensi, menyatakan bahwa tingkat efisien pengeluaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama periode tahun 2020 hingga tahun 2022 mencapai rata-rata sebesar 94% dan dinilai kurang efisien karena hasil perhitungan analisa berada di kisaran interval 90%-100%.
- c. Aspek efektivitas, menyatakan bahwa tingkat efektivitas pengeluaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama periode tahun 2020 hingga tahun 2022 mencapai rata-rata sebesar 95% dan dinilai efektif karena hasil perhitungan analisa berada di kisaran interval 90%-100%.

### 4.2. Saran

Rekomendasi yang dihasilkan dari studi ini adalah:

- a. Berdasarkan tingkat ekonomis, Pemprov DKI sudah cukup ekonomis namun tetap perlu dipertahankan selektivitas program anggaran secara selektif dengan mengelakkan pengeluaran yang tidak menghasilkan atau memangkas biaya yang tidak esensial untuk mencapai tujuan program.aktivitas yang diinginkan.
- b. Dari segi efisiensi, Pemprov DKI Jakarta sebaiknya untuk meningkatkan kinerjanya agar dapat menyeimbangkan realisasi pengeluarannya, sehingga menjadi lebih efisien.
- c. Dilihat dari tingkat ekonomis, Pemprov DKI Jakarta diharapkan agar tetap mempertahankan tingkat efektivitas kinerjanya di tahun-tahun berikutnya.

## Referensi

- Drastiana, T., & Himmati, R. (2021). ANALISIS RASIO KEUANGAN SEBAGAI ALAT PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DAN PROVINSI JAWA TENGAH PADA TAHUN 2019-2020. *SOSEBI: Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis Islam*, 1(1), 51–65. <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/sosebi/article/view/4915/1693>
- Mahsun, M. (2019). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* (1st ed.). Universitas Terbuka.
- Manurung, K. M., & Mauliddina, F. (2021). ANALISIS ANGGARAN KINERJA SEKTOR PUBLIK PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA. *Jurnal Global Manajemen*, 10(2), 87–94. <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/global/article/view/1813/1656>
- Mardiasmo. (2021). *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK* (Terbaru). ANDI.
- Panggabean, F. Y. (2019). KINERJA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI SUMATERA UTARA BERDASARKAN OPINI AUDIT. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(2), 151–159. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/jurnalakundanbisnis/article/view/2692/2288>
- Pardiastuti, N. K. K., & Herawati, N. T. (2020). Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi Penilaian Kinerja Manajemen melalui Analisis Laporan Keuangan. *EKUITAS: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 8(2), 129–136. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/EKU/article/view/26885>
- Polii, I. R. A., Saerang, D. P. E., & Tangkuman, S. J. (2020). ANALISIS PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA BERDASARKAN KONSEP VALUE FOR MONEY. *JURNAL EMBA*, 8(4), 781–788. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/31072>
- Qosasi, A., & Riharjo, I. B. (2022). PENGUKURAN KINERJA DALAM PRESPEKTIF VALUE FOR MONEY PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA. *JIRA: Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(6), 1–15. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4642/4640>
- Rochman, & Pawenary. (2020). ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN PT HARUM ENERGY PERIODE 2014-2019. *JURNAL JEMSI*, 2(2), 171–184. <https://dinastirev.org/JEMSI/article/view/382/228>
- Sahrani, A., & Kusumastuti, R. (2024). Penerapan Penganggaran Pada Organisasi Sektor Publik Ikatan Pemuda Mahasiswa Koto Majidin-Jambi (IPMKM-J). *PROFIT: Jurnal Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*, 3(1), 120–124. <https://doi.org/10.58192/profit.v3i1.1661>
- Sampow, R. R., & Pangkey, R. I. J. (2022). ANALISIS KINERJA KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE VALUE FOR MONEY PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BITUNG. *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado*, 3(2), 261–271. <https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/jaim/article/view/2755/2307>
- Sartisi. (2022). *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK*. CV. Green Publisher Indonesia.
- Susanti, A., Riadi, S., & Sari, D. (2022). ANALISIS RASIO KESERASIAN BELANJA PADA LAPORAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN. *Jurnal Ilmu Manajemen Saburai*, 8(1), 11–18. <https://jurnal.saburai.id/index.php/JIMS/article/view/1600/1166>
- Sutama, I. N., Fatona, F., & Sudiyarti, N. (2022). ANALISIS KINERJA KEUANGAN BERDASARKAN KONSEP VALUE FOR MONEY. *SAMALEWA: Jurnal Riset Dan Kajian Manajemen*, 2(2), 193–200. <https://e-journalppmunsa.ac.id/index.php/samalewa/article/view/1020/1039>
- Tameon, A. F., Rafael, S. J., & Ga, L. L. (2023). ANALISIS KINERJA ANGGARAN MENGGUNAKAN METODE VALUE FOR MONEY PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERODE 2017-2021. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 11(1), 40–50. <https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/JAK/article/view/10250/4954>
- Tegor, Yusmalina, J., & Haqiqi, F. (2021). PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI DAN KUALITAS APARATUR TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. *JURNAL CAFETARIA*, 2(1), 13–24. <https://ejurnal.universitaskarimun.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/276/157>
- Wulandari, R., Iskandar, S., & Fausiah. (2024). Analisis Pengukuran Kinerja Anggaran Belanja Dengan Menggunakan Metode Value For Money Pada Dinas Pariwisata Kota Makassar Periode 2020-2022. *JURNAL MANUHARA*, 2(1), 80–99. <https://journal.arimbi.or.id/index.php/Manuhara/article/view/436/427>